Berita Dewan Pers

Edisi Juni 2017

DEWANPERS

Etika

Menjaga dan Melindungi Kemerdekaan Pers

foto: Metronews.TV

KENANGAN – **Foto kenangan ketika** Menteri Kominfo Rudiantara menyerahkan patung Garuda yang mencengkeram bola dunia dari bahan kayu kepada Asisten Dirjen UNESCO Frank La Roe pada penutupan rangkaian World Press Freedom Day 2017 di Jakarta Convention Center , Kamis (4/5/2017)

Komitmen Memperkuat
Wawasan Kebangsaan dan Revolusi Mental

Media Berita dan Kontra-Terorisme

Kredibilitas Media dan Reputasi Bangsa

Komitmen Memperkuat Wawasan Kebangsaan dan Revolusi Mental

(kemendagri go.id)

FINAL—Pancasilan sudah final bagi Bangsa Indonesia. Begitu penegasan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengutip Pidato Presiden Jokowi pada Peringatan Hari Pancasila. Mendagri memberikan keterangan pers seusai upacara di Kemendagri, Kamis 1 Juni 2017

Pada Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2017 di Kementerian Dalam Negeri, Dewan Pers bersama dengan Komisi Penyiaran Independen (KPI) dan 63 rektor dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia bersepakat untuk bekerja sama memperkuat paham kebangsaan. Hal ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman di Kantor Kemendagri.

Penandatanganan Nota Kesepahaman ini melibatkan Dewan Pers mengingat peran Dewan Pers yang penting dan strategis. Terutama dalam mendorong pers berperan aktif dalam upaya meningkatkan wawasan kebangsaan, meningatkan pemahaman masyarakat dalam hal Pancasila, bela negara dan revolusi mental. Pers diharapkan dapat memberikan sumbangan nyata bagi pengembangan perdamaian dan terwujudnya masyarakat yang inklusif dan memahami prinsip-prinsip keberagaman.

Menurut Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo, "Sebagai penyebar informasi, pers bukan hanya bertugas menyampaikan fakta-fakta dan fungsi *wacth dog*, tapi pers juga berfungsi untuk menyampaikan pesan-pesan kebangsaan".

Ketua Dewan Pers mengharapkan pers dapat berperan menjadi pilar demokrasi ke empat setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif. Pers sebagai kontrol atas ketiga pilar itu dan melandasi kinerjanya dengan *check and balance*. "Untuk dapat melakukan peranannya perlu dijunjung kebebasan pers dalam menyampaikan informasi publik secara jujur dan berimbang.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40/1999 tentang Pers dinyatakan bahwa pers bertugas mewujudkan kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

Yosep Adi Prasetyo menegaskan bahwa inti dari demokrasi adalah adanya kesempatan bagi aspirasi dan suara rakyat (individu) dalam mempengaruhi sebuah keputusan. Dalam demokrasi juga diperlukan partisipasi rakyat, yang muncul dari kesadaran politik untuk ikut terlibat dan andil dalam sistem pemerintahan.

"Pada berbagai aspek kehidupan di negara ini, masyarakat memiliki hak untuk ikut serta dalam menentukan langkah kebijakan suatu negara. Selain itu pers harus ikut berperan dalam menjaga nilai-nilai dan keutuhan bangsa", ujar pria yang akrab disapa Stanley itu. **(red)**

Disesalkan, Peretasan Laman Dewan Pers

Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo menyesalkan terjadinya peretasan terhadap laman resmi Dewan Pers, *dewanpers.or.id*. Laman tersebut dinilai penting karena acap dijadikan rujukan orang untuk memeriksa sejumlah hal terkait pers.

"Kami menyesalkan lah, menurut saya peretasan itu tidak bijaksana orang yang memilih situs Dewan Pers," kata pria yang akrab disapa Stanley itu saat dihubungi di Jakarta, Rabu (31/5/2017).

"Situs itu kan untuk kepentingan publik, misalnya orang bisa mengecek seseorang wartawan abal-abal atau bukan, medianya terdaftar di Dewan Pers atau tidak," dia menambahkan.

Seperti diwartakan banyak media, laman Dewan Pers sempat tidak bisa diakses pada 31 Mei 2017 setelah pukul 08.44 WIB. Laman itu langsung menunjukkan pesan dengan huruf merah berlatar hitam serta lambang Garuda Pancasila berwarna merah yang terkoyak di atasnya.Laman yang diretas itu segera diperbaiki.

Dalam perkembanganya, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim berhasil menangkap pria berinisial AS (28) yang diduga meretas laman resmi Dewan Pers tersebut. AS telah meretas 100 situs, termasuk milik pemerintah.

"Tadi malam, kita melakukan penangkapan yang men-deface web Dewan Pers," kata Kasubdit II Dit Tipidkor Bareskrim Kombes Himawan Bayu Aji di kantornya, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2017).

Banyak Peraturan

Lebih lanjut, Stanley mengatakan, di laman Dewan Pers juga terdapat banyak peraturan dan seruan terkait pers Indonesia, yang kerap dijadikan referensi untuk pemeriksaan berbagai hal, sehingga disayangkan menjadi sasaran peretasan.

Kendati demikian, terkait pesan yang diunggah oleh peretas di laman Dewan Pers mengenai keprihatinan terhadap kondisi bangsa saat ini, Stanley mengaku ia dan rekan-rekannya di Dewan Pers juga merasakan hal yang sama.

"Kalau pesan yang disampaikan dalam peretasan itu sih kami juga prihatin dengan kondisi Indonesia, kami setuju saja," kata Stanley seperti dikutip dari *Antara*.

"Cuma kenapa kok sasarannya Dewan Pers, entah pelakunya sudah memperhitungkan belum apa dampaknya terhadap publik yang biasa mengunjungi situs Dewan Pers," ujar Stanley. **(liputan6.com/detik.com)**

Bupati Lumajang Dukung Surat Edaran Dewan Pers

Bupati Lumajang, Jawa Timur, As'at menanggapi positif surat edaran Dewan Pers tentang larangan bagi pejabat memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada wartawan maupun organisasi jurnalis. "Saya menyambut baik, walaupun itu tidak harus ditafsiri sendiri," kata As'at, Jumat (9/6/2017).

Dewan Pers mengirimkan surat edaran kepada Biro Humas dan Protokoler Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Indonesia. Dewan Pers mengimbau untuk tidak melayani permintaan THR, permintaan barang dan permintaan sumbangan dalam bentuk apapun yang diajukan oleh organisasi wartawan.

Imbauan Dewan Pers dilandasi sikap moral dan etika profesi jurnalis dalam menjaga kepercayaan publik serta menegakkan integritas profesionalisme kewartawanan. "Juga untuk mendukung upaya pemberantasan praktek korupsi yang sedang marak saat ini," kata Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo.

Dewan Pers, kata Yosep, tidak dapat membiarkan praktek tidak terpuji di mana wartawan, perusahaan pers, atau organisasi wartawan yang banyak bermunculan belakangan ini meminta-minta sumbangan bingkisan ataupun THR.

Bupati As'at berjanji memperhatikan edaran tersebut karena menyangkut penggunaan anggaran. "Kalau anggaran tidak diurus dengan hati-hati akan terjadi double accounting, sudah dapat fasilitas ini masih dapat fasilitas ini, fasilitas itu," kata As'at.

As'at menilai, netralitas wartawan adalah wajib. Jangan sampai gara-gara tidak diberi THR wartawan kemudian subyektif dalam memberitakan tentang apa yang sudah dia kerjakan pemerintah untuk masyarakat. ***(TEMPO.CO)***

Dibutuhkan Self Censorship dalam Peliputan Terorisme

Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo, mengungkapkan pentingnya setiap awak media massa memiliki self censorship dalam peliputan isu-isu terorisme.

Hal ini dikatakan Yoseph saat menjadi narasumber dalam forum Diseminasi Pedoman Peliputan Terorisme dan Peningkatan Profesionalisme Media Massa Pers dalam Meliput Isu-isu Terorisme di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Kamis (16/6/2016).

"*Self censorship* adalah kemampuan menyaring. Ketika awak media mendapatkan informasi penting, misalkan dari intelijen, dia harus bisa menyaring mana yang bisa disiarkan dan mana yang tidak," ungkap Yosep melalui keterangan tertulis.

Yoseph yang kesehariannya akrab disapa Stanley juga mengatakan, *self censorship* penting untuk membantu keberhasilan operasi yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Kecerobohan awak media massa dengan menyiarkan semua informasi yang diterimanya, dikhawatirkan justru membantu target operasi aparat melarikan diri.

"Saya pernah satu panel dengan Nasir Abbas, mantan Komandan Mantiqi III Jamaah Islamiyah. Dia bercerita, untuk bisa terus kabur dari kejaran aparat kelompoknya salah satunya memantau pemberitaan media massa," jelas Stanley.

Dalam peliputan isu-isu terorisme, masih kata Stanley, *self censorship* juga dibutuhkan untuk mencegah munculnya teror baru bagi masyarakat. Hal ini disampaikannya dengan mencontohkan beredarnya habar *hoax* di media sosial saat terjadi ledakan bom di kawasan Thamrin, Jakarta, awal tahun 2016 lalu.

"Ketika awak media menerima informasi dari media sosial, biasanya *forward* dari satu tangan ke tangan lainnya, jangan langsung diberitakan. Saring dulu, cek dan ricek dulu kebenarannya. Jangan sampai berita yang disiarkan justru menimbulkan ketakutan baru masyarakat," pungkas Stanley. ***(okezone.com)***

Media Berita dan Kontra-Terorisme

Oleh S.H. Sarundajang

Aksi terorisme masih menjadi tantangan besar bagi komunitas dunia hingga saat ini. Sejak awal Januari hingga awal Juni tahun 2017 setidaknya ada sembilan peristiwa serangan teroris mematikan yang terjadi secara beruntun di negara-negara seperti Inggris, Turki, Rusia, Swedia, Australia, Filipina hingga Indonesia. Nyawa manusia seakan tidak berharga lagi dan direnggut secara paksa oleh tindakan pengecut dan tanpa ampun para teroris. Meskipun tidak terlihat bukti secara nyata, namun ISIS mengklaim bertanggung jawab atas sebagian besar serangan-serangan tersebut.

Kita semua sepakat bahwa semua aksi terorisme dengan berbagai alasan harus segera dihentikan. Karenanya, setiap negara di dunia harus bekerja sama untuk menghadapi musuh bersama ini. Demikian pula dengan media sangat diharapkan untuk berperan aktif dalam perang terhadap terorisme karena memiliki keterkaitan erat. Secara khusus media pemberitaan yang akan saya paparkan pada kesempatan ini.

Terorisme dan perang melawan terorisme adalah elemen utama dalam perpolitikan baik domestik maupun internasional, di mana secara nyata media berada di posisi garis depan, terutama ketika masyarakat sipil yang menjadi target serangannya. Setiap tindakan terorisme baik berskala besar maupun kecil akan memberikan dampak pada peliputan berita yang tak terelakkan oleh media massa. Media kontemporer/modern sangat mendambakan bahan cerita yang ideal dan menarik hati bagi manusia berupa drama, syok, tragedi, dan dukacita. Akibatnya, teroris mendapatkan kebutuhan utamanya yaitu publisitas besar dan kesempatan untuk menunjukkan kemampuan mereka menyerang bahkan kepada negara atau bangsa terkuat sekalipun. Sementara bahan cerita tersebut memberikan energi kepada media untuk berkompetisi dalam meraih ukuran audiens dan sirkulasi yang lebih besar karena berita tersebut. Target pendapatan melalui iklan sangat penting dalam industri media. Dengan demikian terorisme dan media terjadi hubungan simbiosis dengan saling memberi "makan" satu dengan lainnya. Bahkan lebih daripada itu mantan Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher pernah mengatakan bahwa media adalah "oksigen terorisme". Selanjutnya adanya tuduhan juga yang mengatakan bahwa media menjadi "megafon" terorisme untuk menarik perhatian khalayak menjadi bahan perdebatan karena pemberitaan yang berlebihan.

Tindakan terorisme secara seksama dirancang dan ditujukan untuk orang-orang yang menonton atau membaca berita tersebut, bukan kepada korban akibat dari serangan teror. Para ekstrimis politik mengerti bahwa tindakan kekerasan yang mereka lakukan akan mempublikasikan keberadaan mereka dan tindakan yang mereka lakukan. Untuk alasan inilah pada abad ke-19 para pelaku anarkis menjelaskan kekerasan mereka sebagai *"propaganda of the deeds"*, melakukan pernyataan kepada publik dengan tindakan kekerasan pada masa jauh sebelum Gutenberg menemukan mesin cetak. Di era tersebut, pelaku teror yakin bahwa dengan menyerang tempat-tempat kerumunan akan ada banyak sekali saksi mata yang akan menyebarkan berita kepada keluarga, teman, dan kenalan mereka.

Namun, seiring dengan perkembangan teknologi sekarang ini, munculnya teknologi komunikasi terbaru juga akan meningkatkan kemampuan para teroris untuk mengekspoitasi perkembangan industri pemberitaan untuk mencapai tujuan-tujuan mereka. Para pelaku teror tidak hanya bergantung pada "penjaga gerbang" media tradisional (koran, majalah berita, radio dan televisi) saja, tetapi juga berusaha untuk mengabaikannya dengan beradaptasi dan

BERAKSI --Salah seorang pelaku penembakan saat aksi teror di Jalan MH Thamrin, kawasan Sarinah, Jakarta, Kamis (14/1/2016)

(ANTARA FOTO/XINHUA/Veri Sanovri)

meningkatkan kemampuannya dalam menggunakan instrumen-instrumen penting propaganda lainnya seperti penggunaan mesin cetak dan fotokopi, radio komunikasi, telepon satelit, DVD, video games, musik populer, novel, kanal televisi sendiri hingga media sosial dan internet.

Tujuan teroris yang pada akhirnya politik, meskipun ketika memberikan kesan tindakan mereka adalah sebagai motivasi religius. Beberapa dari mereka menginginkan kemerdekaan nasional, yang lain bersaing untuk perubahan rezim, masih ada lagi yang menuntut penarikan kekuatan asing dari sesuatu negara atau wilayah. Apapun tujuan akhir mereka, para teroris tahu bahwa publisitas dan propaganda diperlakukan untuk tujuan mereka yang lebih besar. Tanpa membuat teman dan musuh menyadari keberadaan, motivasi serta tujuan para teroris tidak akan melanjutkan agenda politik mereka.

Jadi, ketika teroris menyerang atau mengancam melakukan kekerasan, mereka memiliki tujuan yang bergantung pada media karena beberapa alasan berikut: pertama, teroris menginginkan kesadaran audiens yang berada di dalam maupun di luar masyarakat yang menjadi sasaran tujuan mereka, sehingga target intimidasi mereka akan terpenuhi. Kedua, teroris menginginkan apa yang mereka lakukan diketahui oleh masyarakat. Mereka ingin orang bertanya, Mengapa membenci kita? Mengapa mereka menyerang warga sipil yang tidak berdosa? Ketiga, teroris menginginkan rasa hormat dan simpati dari orang-orang yang tertarik dengan tindakan yang dilakukannya. Keempat, teroris menginginkan status menguasai secara sah dan menerima perlakuan yang sama dari media atau serupa dengan apa yang diterima oleh aktor-aktor politik lainnya. Dengan memperhatikan tujuan-tujuan tersebut muncul pertanyaan sejauh mana perluasan liputan berita dapat menepis semua tujuan tersebut di atas.

Bagi teroris, mendapat perhatian dari media berita, publik, dan otoritas pemerintah tidaklah cukup. Mereka biasanya berniat untuk mempublikasikan alasan politik mereka dan bergantung pada media massa untuk menjelaskan dan mendiskusikan alasan mereka untuk beralih ke kekerasan. Latihan dalam komunikasi strategis atau diplomasi publik ini dirancang untuk menginformasikan dan mendidik kawan dan lawan tentang motif tindakan teroris. Agar hal ini terjadi, pelaku terorisme tidak perlu melakukan

penjelasan sendiri, medialah yang akan melakukannya untuk mereka.

Di negara-negara yang berdemokrasi liberal dengan populasi masyarakatnya yang besar dan majemuk, kebanyakkan perpolitikan modernnya akan bergantung pada komunikasi yang termediasi secara masal karena interaksi pribadi secara langsung antara warga masyarakat dan pejabat pemerintah merupakan hal yang sudah biasa, bukan lagi diatur oleh regulasi atau peraturan. Dengan demikian, komunikasi politik sebagian besar yang terjadi di dalamnya membentuk segitiga komunikasi politik. Media massa, publik, dan pemerintah membentuk tiga sudut. Media sebagai *gatekeepers* (penjaga gerbang) tidak hanya mengendalikan akses terhadap berita, tapi juga akses ke masyarakat umum dan juga kepada pejabat pemerintah. Namun, ketika para ekstrimis menggunakan kekerasan politik-terorisme dengan kata lainnya, gerbang media terbuka untuk *propaganda of the deeds* dan menyebarkan pesan-pesan teror ke kedua sudut lainnya yaitu khalayak umum dan para pejabat pemerintahan.

Sama seperti para teroris memanfaatkan segitiga komunikasi politik tersebut, pemerintah juga memanfaatkan bentuk komunikasi masal ini. Memang, untuk masuk dalam segitiga komunikasi ini teroris harus menggunakan kekerasan atau membuat ancaman yang dapat dipercaya oleh media sebagai penjaga gerbang, sementara pejabat publik atau pemerintah tidak harus melepaskan kekerasan untuk mendapatkan akses tersebut karena pemerintah adalah bagian dari satu sudut segitiga komunikasi tersebut. Karena kuatnya sumber informasi dari pemerintah, terjadilah kecenderungan dalam mendominasi pelaporan mengenai kebijakan keamanan baik dalam dan luar negeri – terutama bila ini melibatkan konflik militer atau kemungkinan penempatan militer di suatu wilayah. Di Amerika Serikat, misalnya, sumber berita dominan ini biasanya berada di gedung putih, departemen luar negeri, dan pentagon.

Setelah setiap serangan teror, para ahli mempertanyakan tingkat dan nada liputan media. Mereka membandingkan kematian akibat terorisme dengan jumlah korban bencana alam, perang atau kecelakaan lalu lintas, selanjutnya meminta lebih banyak pembatasan terhadap media. Tapi perbandingan tersebut paling sering bermunculan karena sifatnya yang jelas-jelas adalah politis dan sosial. Seorang peneliti politik asal Venezuela, Moises Naim mengungkapkan bahwa "Pada tahun 2014, tingkat rata-rata pembunuhan di seluruh dunia adalah 6,24 kematian per 100.000 penduduk, sementara jumlah yang terbunuh oleh terorisme hanya 0,47 per 100.000, namun jika angka-angka ini relatif rendah dibandingkan dengan penyebab kematian lainnya, konsekuensi terorisme tidak dapat diukur. Terorisme bukanlah ancaman paling mematikan abad ke-21, namun tidak dapat disangkal telah mengubah dunia." Terlepas dari hal tersebut, apakah jumlah liputan terorisme di media tidak sebanding?

Dalam melaksanakan peliputan terorisme sangatlah dibutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang kontra-terorisme. Sejumlah institusi, kementerian, layanan dan unit terlibat dalam hal ini dengan suatu misi yang dijalankan dan memperoleh hak istimewa dalam pelaksanaannya. Kontra-terorisme menyiratkan banyak spesialisasi dan teknik surveilans serta intervensi yang canggih. Hal ini juga melibatkan segenap kekuatan baik eksekutif dan yudikatif, tapi juga legislatif, dengan pembentukan komite intelijen dan keamanan dalam parlemen serta komisi penyelidikan khusus. Upaya-upaya untuk membangun kerjasama kontra-terorisme secara internasional adalah sangat kompleks dengan keterlibatan badan dunia serta institusi-institusi dunia lainnya yang sangat jarang dan lemah membahas masalah tersebut.

Berpikir secara global sangat penting dalam perang melawan terorisme. Ini bukan hanya masalah kemanusiaan dan efektifitas, tapi juga kualitas jurnalistik. Dilema dan tantangan sangatlah jelas bahwa masyarakat berharap media untuk memberikan informasi semaksimal mungkin tanpa berlebihan atau mengarah pada sensasionalisme. Pihak berwenang menuntut pengengkangan dengan mengukur resiko cakupan yang berlebihan untuk integritas operasi atau menjaga ketentraman masyarakat.

Penting untuk diingat bahwa terorisme bukanlah fenomena baru. Banyak negara telah menderita selama puluhan tahun dari kelompok-kelompok tersebut, baik internal maupun eksternal, termasuk aktor negara dan non negara, yang melakukan kekerasan

terhadap warga sipil sebagai strategi politik. Dalam banyak kasus, penduduk lokal menjadi lebih kuat dan lebih tangguh, membuktikan bahwa kebrutalan tidak cocok dalam jangka panjang untuk kemajuan persatuan dan nilai-nilai kebersamaan. Dalam konteks ini, media sangat penting dalam memberikan informasi yang dapat diverifikasi serta opini-opini selama menghadapi situasi krisis yang menegangkan, sementara masyarakat dalam keadaan emosi yang menyala-nyala sehingga peranan media menjadi semakin penting.

Resiko sebenarnya dari terorisme adalah ketakutan dan kecurigaan akan mendorong gelombang baru nasionalisme dan populisme, dan bahwa kebebasan yang diperoleh dengan kerja keras pada akhirnya harus dikorbankan. Ini bukanlah sebuah serangan terhadap satu bangsa namun menyerang kita semua sebagai warga global. Kita seharusnya menjadi kritis dan tanggap terutama terhadap aktor-aktor yang dengan sengaja bermain menggunakan kekerasan tanpa harus menjadi korban atau martir karena dengan tidak sengaja telah terlibat bahkan terekrut oleh aksi terorisme. Di masa-masa sulit ini, dengan masyarakat yang terfragmentasi dan banyak organisasi media menghadapi tantangan keuangan yang parah, para jurnalis harus menahan keinginannya untuk mengetahui hal-hal yang menarik mata, telinga maupun "panggilan" ketukan *keyboard*. Para jurnalis harus menjaga perspektif global, dan memperhatikan kata-kata yang mereka gunakan, contoh yang mereka kutip, serta gambar yang mereka tampilkan. Mereka harus menghindari spekulasi dengan bantuan jari jemari di dalam kebingungan akan adanya serangan yang tidak diketahui. Namun demikian permintaan akan diinformasi adalah yang terkuat dari semuanya.

Para jurnalis harus mempertimbangkan dengan cermat fakta bahwa ada sesuatu yang melekat dalam terorisme dengan tindakan kekerasan telah menimbulkan rasa takut berlebihan pada banyak hal. Dan para pemilik serta pengelola organisasi atau bisnis media hendaknya memastikan mereka tidak menempatkan diri beserta para staf jurnalisnya dalam bahaya untuk mengejar sebuah bahan berita. Pada akhirnya yang terutama dan paling penting, harus menghindari tersebarnya isu-isu kebencian dan radikalisasi dalam masyarakat.

Dengan memahami sentralitas media dan teknologi komunikasi yang merupakan aspek terpenting dalam kontra terorisme, media tradisional sebagai *gatekeepers* memiliki tanggung jawab khusus untuk menerapkan pengaruhnya secara hati-hati dengan dipandu oleh standart jurnalistik tertinggi. Raja media yang terkenal Rupert Murdoch pernah menyampaikan ***"Great journalism will always attract readers. The words, pictures, and graphics that are the stuff of journalism have to be brilliantly package; they must feed the mind and move the heart."***

(Jurnalisme yang hebat akan selalu menarik para pembacanya. Perkataan, gambar, dan grafis adalah perangkat jurnalisme yang harus secara cerdas dikemas; perangkat tersebut harus mengisi pikiran dan menggugah hati). ***

SH Sarundajang, anggota Dewan Pers

PENGURUS DEWAN PERS PERIODE 2016-2019:

- **Ketua:** Yosep Adi Prasetyo
- **Wakil Ketua:** Ahmad Djauhar
- **Anggota**: Anthonius Jimmy Silalahi, Imam Wahyudi, Nezar Patria, Hendry Chairudin Bangun, Ratna Komala, Reva Dedy Utama, Sinyo Harry Sarundajang
- **Sekretaris (Kepala Sekretariat):** Lumongga Sihombing

REDAKSI *ETIKA*:

- **Penanggung Jawab:** Yosep Adi Prasetyo
- **Redaksi:** Herutjahjo, Chelsia, Lumongga Sihombing, Ismanto, Dedi M Kholik, Wawan Agus Prasetyo, Reza Andreas (foto)

- **Surat dan Tanggapan Dikirim ke Alamat Redaksi:**

Gedung Dewan Pers, Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110.
Tel. (021) 3521488, 3504877, 3504874 - 75, Faks. (021) 3452030
Surel: sekretariat@dewanpers.or.id
Twitter: @dewanpers
Laman: www.dewanpers.or.id / www.presscouncil.or.id

*(**ETIKA** dalam format pdf dapat diunduh dari website Dewan Pers: www.dewanpers.or.id)*

Kredibilitas Media dan Reputasi Bangsa

Oleh: Bagir Manan

BAGIAN 1

Pendahuluan

Perlu disadari, setiap fenomena, setiap sistem, tidak hadir atau tercipta semata-mata karena faktor internal fenomena atau sistem yang bersangkutan, melainkan tali-temali, bahkan sebagai hasil hubungan yang saling mempengaruhi satu sama lain. Tidak jarang pula, suatu fenomena atau sistem adalah hasil reaksi dari fenomena atau sistem lain. Inilah yang kemudian menimbulkan ungkapan: "yang tetap itu adalah perubahan." Kita mengenal teori dialektika Marx (tesis-antitesis-sintesis). Tetapi ada juga perkembangan yang tidak dialektis (bukan hasil pertentangan) melainkan hasil evolusi (teori evolusi fisik Darwin, teori evolusi sosial Spencer). Namun semua teori ini berasumsi, perubahan akan menuju keadaan yang lebih baik dalam makna fisik, sosial, politik, ekonomi, budaya. Dalam kenyataan, perubahan dapat juga menuju keadaan yang lebih buruk. Teori dialektika Marx dalam bentuk pertentangan kelas antara kapitalis lawan proletar, melalui revolusi akan melahirkan masyarakat tanpa kelas (*classless society*) atau masyarakat komunis (sintesis), suatu masyarakat tanpa penindasan dan pemerasan oleh kelas kapitalis terhadap kelas proletar (tidak ada *exploitation de l'homme par l'homme*). Apabila masyarakat seperti ini dapat diwujudkan, tidak perlu lagi kekuasaan (negara), tidak perlu hukum. Namun, ada masa transisi yang disebut "kediktatoran proletariat". Masa transisi akan ada selama ada kelas kapitalis. Kenyataan, tidak berjalan seperti hipotesis Marx. Malahan kelas kapitalis berangsur-angsur berubah. Tanpa melalui proses dialektis, kapitalisme yang ditopang liberalisme melahirkan konsep-konsep kesejahteraan dan keadilan sosial, demokrasi (politik dan sosial) yang mewujudkan kesejahteraan dan kebebasan. Sebaliknya kediktatoran proletariat menjadi sistem yang serba menindas, kekuasaan negara yang makin menguat sebagai alat penindas. Demokrasi karena berbagai ulah pelakunya dapat mundur menjadi otoritarian atau kediktatoran. Dalam teori ilmu negara (*staatsleer*) dikenal teori siklus Polibios (Yunani). Walaupun demikian, perlu dicatat, tidak benar kalau ada anggapan faktor eksternal selalu determinan. Ada kalanya, faktor internal menjadi faktor determinan perubahan. Di atas telah dikemukakan, kemungkinan demokrasi berubah menjadi otoritarian, karena tingkah laku para pelaku demokrasi itu sendiri. Demokrasi dihancurkan oleh demokrasi. Independensi media dijual sendiri oleh media karena menerima amplop, berkolaborasi dengan penguasa, menjadi partisan, menjadi alat propaganda dll.

Berdasarkan premis di atas, kenyataan menunjukkan, kredibilitas pers dan reputasi bangsa, secara serentak ditentukan, baik oleh faktor-faktor internal, maupun pengaruh dari lingkungan sekitar, baik pengaruh dari suatu atau berbagai fenomena atau pengaruh dari suatu atau berbagai sistem. Kita mengenal ungkapan: *"situation gebundenheit"* (keadaan atau lingkungan itu menentukan). Tarik menarik antara faktor-faktor internal-eksternal akan tercermin dalam ouput perubahan atau perkembangan. Pada saat ini, ada keluhan, tata kehidupan kenegaraan dan ekonomi kita menjadi liberal bahkan berada dalam pelukan liberalisme – individualisme, sesuatu yang bertentangan dengan cita negara (*staatsidee*) UUD 1945. Berbagai faktor eksternal di satu pihak dan ketidakberdayaan internal di pihak lain menjadi penyebab kecenderungan tersebut. Ciri-ciri kehadiran liberalisme—antara lain—privatisasi, sistem pasar bebas, kapitalisme dan lain-lain. Salah satu akibatnya adalah merajalelanya modal dan perusahaan asing tanpa batas, termasuk usaha-usaha yang semestinya dikuasai negara baik karena menguasai hajat banyak orang maupun kepentingan negara itu sendiri.

Kredibilitas media

Apakah semestinya (*should be*) makna "kredibilitas media"? Secara kebahasaan, kredibilitas media artinya media yang mampu memikul kepercayaan dan dapat dipercaya (*media trust*). Secara esensial, media kredibel adalah media yang senantiasa mengkedepankan *responsibility* dan *accountability* Secara jurnalistik, *media trust* biasanya dibangun atas dasar ketaatan terhadap prinsip-prinsip jurnalisme, baik dalam arti mekanisme maupun etik, ketaatan terhadap kelaziman jurnalistik (*the best practices of democratic media*), dan ketaatan pada hukum. Apakah hal itu cukup untuk membangun kepercayaan? Belum cukup, tanpa disertai misi publik baik dalam makna menjadi penyambung lidah publik, melindungi publik, menjadi avant garda publik.

Persoalannya: "terhadap siapa media harus memikul atau menjaga kepercayaan?" Apakah media hanya harus kredibel di depan publik atau termasuk juga kredibel di depan penguasa publik atau keduanya?"

Dalam masyarakat dan sistem politik dan sosial demokratis, kredibilitas media semestinya berlaku baik terhadap publik maupun penguasa, atau setidak-tidaknya dilakukan secara berimbang. Namun, acapkali, media atau pranata apapun, bahkan perorangan dihadapkan pada pilihan. *Media secara natur adalah pranata publik.* Dengan demikian *pada dasarnya (sebagai principles) apabila dihadapkan pada pilihan semestinya media ada di pihak publik, lebih-lebih jika penguasa sama sekali tidak bekerja untuk kepentingan publik, apalagi penguasa melanggar hak-hak publik atau menindas publik. Tetapi dapat pula terjadi, publik berlaku tak semena-mena atau terjadi eksploitasi publik untuk kepentingan yang bukan kepentingan publik.* Dalam keadaan demikian, media tidak layak apriori berpihak kepada publik yang tidak mengemban kepentingan publik. Kita mengenal bermacam-macam kepentingan publik seperti keamanan, ketenteraman, kenyamanan, kesejahteraan, keadilan dan lain-lain. Dalam masyarakat demokratis, berbagai kepentingan itu adalah "hak" yang dapat diperjuangkan, dipertahankan, dan harus dijamin dan dilindungi. Tetapi secara serentak harus juga dikatakan, dalam masyarakat demokratis, hampir tidak ada hak yang tidak serentak melekat pula kewajiban. Untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, diperlukan aturan main (*rule of the game*), baik yang bersifat hukum, etik, kelaziman, dan lain-lain tatanan hidup bersama. Lagi-lagi, dalam masyarakat demokratis, segala bentuk aturan main bersama merupakan wujud kehendak bersama atau *general will* (Rousseau).

Kredibilitas media akan terbangun apabila dipenuhi aspek-aspek internal dan aspek-aspek eksternal.

Pertama; aspek internal, yang dapat dibedakan antara aspek-aspek jurnalistik dan aspek nonjurnalistik.

Aspek jurnalistik. Media akan kredibel apabila secara jurnalistik bermutu. Untuk bermutu, selain senantiasa menjunjung tinggi independensi dan taat pada kode etik jurnalistik, para jurnalis dan pengelola *newsroom* cq editor harus memiliki kapasitas intelektual dan keterampilan di bidang jurnalistik atau di luar jurnalistik. Tidak kalah penting, memiliki wawasan baik ilmiah maupun non ilmiah. Bukanlah suatu kapasitas intelektual kalau hanya bertumpu pada pengetahuan yang banyak atau ilmu yang tinggi, tanpa disertai wawasan. Kapasitas intelektual harus ditunjukkan bahwa ilmu yang dimiliki menjadi tuntunan bekerja dan bersikap, memiliki tanggung jawab terhadap perikehidupan publik, mencintai kebenaran dan memiliki keberanian menegakkan kebenaran. Sutan Syahrir menyebutkan: ciri intelektual itu yaitu menjadikan ilmu sebagai hati nurani. Mohammad Hatta mengatakan, ciri keterpelajaran itu adalah karakter (kepribadian) yang bertanggung jawab. Ilmu dapat dipelajari, kata Bung Hatta, karakter adalah sesuatu yang tumbuh sebagai hasil latihan (latihan bertanggung jawab). Pada saat ini, kita telah memiliki sangat banyak sarjana, tetapi hal itu belum tentu seiring dengan kehadiran keterpelajaran (intelektual) yaitu lapisan orang-orang yang bertanggung jawab.

Aspek nonjurnalistik yaitu yang bertalian dengan pengelolaan (managerial). Aspek ini bertalian dengan media (pers) sebagai perusahaan. Selain harus dikelola menurut tatanan pengelolaan perusahaan yang baik dan sehat, menjalankan fungsi-fungsi perusahaan modern untuk memperoleh laba, menjalankan prinsip-prinsip *corporate social responsibility*, pengelola cq pemilik perusahaan media, juga wajib memiliki kesadaran mengenai hakikat pers, fungsi pers, dan asas serta kaidah media

sebagai suatu kegiatan jurnalistik. Pengelola perusahaan atau pemilik media wajib menghormati dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip yang harus berlaku sebagai syarat agar di perusahaan media dapat menghasilkan produk-produk jurnalistik yang bermutu dan kredibel. Tanpa kesadaran semacam itu, media hanya sekedar alat perusahaan untuk mencari laba atau tujuan lain yang dapat melanggar prinsip-prinsip jurnalistik. Pada saat ini—paling tidak—ada dua sumber kerisauan publik dan pengelola jurnalistik, terhadap pengelola perusahaan atau pemilik media.

Motif mencari laba. Telah dikemukakan, motif mencari laba merupakan konsekuensi media sebagai industri, media sebagai usaha ekonomi. Yang merisaukan publik dan juga para pengelola jurnalistik, praktek-praktek campur tangan pengelola atau pemilik perusahaan yang mempengaruhi kerja wartawan dan pekerja *newsroom* semata-mata dari kepentingan perusahaan bukan kepentingan menjaga kredibilitas media. Bahkan semua arah kebijakan dan aktivitas jurnalistik harus dilakukan demi kepentingan ekonomis pengelola atau pemilik perusahaan media. Semestinya, sebagai perusahaan media (perusahaan pers), pengelola (pemilik) harus menjaga kredibilitas media. Setidak-tidaknya ada keberimbangan (simbiosis mutualistik).

Motif kepentingan politik. Kita baru saja melalui peristiwa politik lima tahunan yang sangat besar: Pemilihan umum anggota legislatif dan pemilihan Presiden-Wakil Presiden. Ada sejumlah pengelola perusahaan atau pemilik media yang menjadi bagian dari kompetisi tersebut sebagai: "pimpinan partai politik tertentu, atau diusung untuk menjadi calon Presiden, atau menyokong seorang calon Presiden."

Persoalan tidak pada keikutsertaan dalam politik tersebut, melainkan penggunaan media yang dikelola atau dimiliki menjadi instrumen politik dengan meninggalkan asas-asas dan kaidah jurnalistik yang semestinya wajib senantiasa dijunjung tinggi oleh setiap media demokratis, independen dan menjunjung tinggi kode etik. Presiden SBY sampai menggunakan ungkapan: "media terbelah," meng-hadapi pemilihan Presiden-Wakil Presiden. Apabila media tidak berhasil menjadikan asas-asas jurnalisme yang sehat sebagai *way of life*, "media terbelah" hampir pasti berulang pada setiap siklus politik lima tahunan. Dalam sejumlah pertemuan atau diskusi yang saya hadiri, ada berbagai pesan kerisauan mengenai situasi media yang "berpolitik" itu.

Tajamnya keberpihakan media lebih merisaukan publik pada saat menghadapi pemilih Presiden-Wakil Presiden. Beberapa media menjadi begitu partisan untuk memenangkan calon yang mereka dukung, termasuk penggunaan quick count yang semestinya sebagai kegiatan ilmiah yang netral (tunduk pada metode dan analisis ilmiah), dicoba dipergunakan sebagai alat keberpihakan tanpa mengindahkan syarat-syarat ilmiah yang harus dipenuhi. Sangat berlebihan. Menghadapi kenyataan ini, Dewan Pers menyampaikan pendirian, bahwa, memiliki preferensi, menentukan pilihan merupakan bagian dari independensi cq *the right to freedom of choice, the right to freedom of opinion*. Namun sebagai pers, penggunaan hak-hak tersebut tidak boleh sekali-kali mencederai makna independensi itu sendiri, tidak mencederai prinsip-prinsip kode etik, tidak mengurangi kewajiban memelihara *the best practises of democratic media*, apalagi melanggar hukum. Di atas semua itu, betapa penting media menjaga *honesty* dan *dignity* dirinya sendiri. Kalau tidak, media yang bersangkutan akan berangsur-angsur ditinggalkan publik. Publik adalah hakim yang sangat sulit bahkan tidak mungkin dibantah.

Walaupun mengetahui dan melihat kecenderungan kepartisan tersebut, Dewan Pers tidak terburu-buru untuk menyimpulkan telah terjadi pelanggaran yang begitu mendasar sehingga perlu ada tindakan di luar yang sudah lazim dilakukan. *Pertama;* meskipun pada segmen politik telah menimbulkan berbagai kerisauan, segmen-segmen lain dari media yang bersangkutan masih tetap dijalankan atas dasar prinsip-prinsip jurnalisme yang baik. *Kedua;* ketidakhati-hatian mengambil tindakan dapat menjadi blunder dan mendekatkan dunia pers kembali dalam *killing ground* penyensoran (censorship) yang merupakan antitesis kemerdekaan pers. *Ketiga;* di tengah-tengah berbagai kepartisan tersebut, masih ditemukan media berpengaruh yang tetap menjaga tata krama jurnalistik yang sehat.

Demikian beberapa hal internal yang akan berpengaruh pada kredibilitas media.

Bersambung edisi berikutnya..

Dewan Pers Selesaikan 2 Pengaduan Melalui Mediasi. Dikeluarkan 3 PPR

(foto: Etika/Maria)

BERFOTO -- Ketua Komisi Pengaduan Imam Wahyudi (tengah) berfoto bersama Sdr Yanuar P Wasesa dari BBHA selaku Pengadu (kiri) dan Pemred Terbit, Ali Akbar Soleman selaku Teradu (kanan).

Sepanjang Juni 2017, Dewan Pers berhasil menyelesaikan 2 (dua) pengaduan melalui mediasi dan ajudikasi yang dituangkan dalam Risalah Penyelesaian Pengaduan (Risalah). Pada saat yang sama, Dewan Pers mengeluarkan Pernyataan Pernilaian dan Rekomendasi (PPR) untuk tiga media.

Risalah Penyelesaian Pengaduan itu terkait pengaduan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk terhadap Surat Kabar *Berita Kriminal*. PT Telkom mengadukan 3 berita yang terbit April dan Mei 2017, yang dianggap merugikan dirinya.

Setelah meminta klarifikasi kepada para pihak, Dewan Pers menilai berita tersebut melanggar Pasal 1 dan 3 Kode etik Jurnalistik karena tidak uji informasi, tidak berimbang dan memuat opini yang menghakimi.

Berita Kriminal memang telah memuat Hak Jawab PT Telkom,namun belum cukup memadai. Karena itu *Berita Kriminal* wajib memuat Hak Jawab kembali disertai permintaan maaf kepada PT Telkom dan masyarakat.

Sedangkan Risalah lainnya terkait pengaduan Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) Pusat PDI-P terhadap *Harian Terbit*. BBHA yang diwakili Saudara Yanuar dkk itu mengadukan berita berjudul "Terbuka Peluang Megawati Jadi tersangka BLBI" (edisi Kamis 27 April 2017).

Dewan Pers menilai, *Harian Terbit* melanggar Pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik karena tidak uji informasi, tidak berimbang dan memuat opini yang menghakimi. *Harian Terbit* wajib memuat Hak Jawab disertai permintaan maaf kepada Pengadu dan masyarakat.

Kemudian Pernyataan Pernilaian yang dikeluarkan Dewan Pers terkait media online *Bantennews.co.id* atas pengaduan Dedy Hartadi selaku Tim Komunitas Relawan Pemuda Kota Serang, Surat Kabar Umum (SKH) *Metropolitan* atas pengaduan PT Telkom Indonesia (persero) Tbk dan SKH *Nuansa Pos* atas pengaduan Bupati Poso,Darmin Agustinus Sigilipu.

Ketiga media itu memiliki kesalahan yang beragam. Namun yang menarik untuk dicatat, Dewan Pers mengeluarkan Rekomendasi selain media-media itu wajib melayani Hak Jawab dan meminta maaf karena berita yang mereka buat mengandung opini yang menghakimi, ada juga media yang diwajibkan untuk memberikan sanksi berupa pemecatan atau skorsing kepada wartawannya karena telah melakukan pelanggaran berat berupa plagiasi dan menjadikan dirinya sendiri sebagai nara sumber dalam kapasitas sebagai Ketua LSM. Ini untuk SKH *Metropolitan*. **(red)**